

BAB III

KONDISI PENDIDIKAN DI PAPUA TAHUN 2010-2015

Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar ke-dua di dunia setelah Greenland. Sekitar 47persen wilayah pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea, Irian Barat, West Irian, serta Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal sebagai Papua. Sebagian lainnya dari wilayah pulau ini adalah wilayah negara Papua New Guinea (Papua Nugini), yaitu bekas koloni Inggris. Populasi penduduk di antara kedua negara sebetulnya memiliki kekerabatan etnis, namun kemudian dipisahkan oleh sebuah garis perbatasan. Papua memiliki luas area sekitar 421.981 kilometer persegi dengan jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,3 juta. Papua berada di wilayah paling timur negara Indonesia. Ia merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Greendland di Denmark. Luasnya capai 890.000 Km². provinsi ini memiliki wilayah yang sangat luas serta sumber daya alam yang berlimpah dan budaya tradisional yang beraneka ragam. Provinsi Papua secara administratif terbagi menjadi 19 kabupaten dan 1 kota dengan Jayapura sebagai ibukota provinsi. Papua merupakan Provinsi terluas di Indonesia, setelah dikurangi daerah yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat luas wilayahnya menjadi 317.062 km², membujur dari barat ke timur (Sorong-Jayapura) sepanjang 1.200 km (744 mile) dan dari utara ke selatan (Jayapura - Merauke) sepanjang 736 km (456 mil).

Provinsi ini berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, Laut Arafura di sebelah selatan, Provinsi Papua Barat di sebelah barat dan Negara Papua New Guinea di sebelah timur. Dari total luas 317.062 km² tersebut, diperkirakan lebih dari 40persen yaitu seluas 128.700 km² merupakan tanah yang cocok digunakan sebagai areal pertanian. ¹

Dalam dunia pendidikan Papua ataupun Papua Barat kualitas pendidikannya lebih rendah dari pada pendidikan di daerah lain di Indonesia. Apabila dilihat dari akreditasi institusinya, hingga saat ini belum ada satupun perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik di wilayah Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Lebih dari 31persen penduduk Papua berada di bawah lima belas tahun, dan hanya 10persen berusia lebih dari lima puluh. Tanah Papua memiliki etnis yang amat beragam, dengan lebih dari 200 bahasa, 44 suku utama, dan 177 sub-suku. Setengah penduduk yang ada di Provinsi Papua berasal dari provinsi atau daerah lain di Indonesia. Dalam hal ekonomi Papua memiliki hasil mineral, hutan tropis, dan sumber daya kelautan, Papua memiliki Produk Domestik Regional Bruto tertinggi (PDRB) di Indonesia. Penghasilan yang cukup besar berasal dari pertambangan dan penggalian (62,76persen dari pendapatan daerah) dan dari kehutanan (5,3persen). Namun, umumnya penduduk Papua bekerja di bidang pertanian, perikanan, dan berburu. Meskipun memiliki PDRB yang tinggi, provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, di mana lebih dari 80persen rumah tangga hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2009, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua adalah

¹ Kanreg IX Jayapura. *Wilayah Kerja Kanreg IX BKN Jayapura*. Diakses pada 20 Februari 2017. <<http://www.bkn-jayapura.net/berita-150-wilayah-kerja-kanreg-ix-bkn-jayapura.html>>

64,3, terendah di negeri ini, dibandingkan IPM nasional 73,4 pada tahun yang sama. Jarak rata-rata sebuah rumah tangga ke fasilitas kesehatan terdekat masyarakat adalah 32km. Kurang lebih 20persen masyarakat yang dapat menikmati sumber air yang aman dan baik dan hanya 9persendari kelompok penduduk miskin memiliki kesempatan untuk menikmati akses ke sumber air yang aman dan baik. Setengah dari desa-desa yang ada hanya dapat diakses oleh jalan yang belum beraspal, dan akses ke fasilitas komunikasi seperti telepon terbatas hanya bisa diakses sekitar 10persen oleh masyarakat miskin.

Meskipun Papua kaya akan sumber daya alamnya namun untuk kualitas pendidikan di Papua masih sangat kurang. Masalah pendidikan merupakan permasalahan sumber daya manusia yang berada di suatu wilayah, terlebih khususnya di wilayah Papua. Pendidikan harus ditempuh oleh setiap individu, karena pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia yang harus ditempuh pada masa kini. Wajah pendidikan di Papua sangat jelas, masih tampak suram. Meskipun kini banyak orang Papua sudah bersekolah tinggi, bahkan hingga menjadi profesor dan doktor, namun realitas itu belum menggambarkan kondisi nyata wajah pendidikan di Papua. Masalah pendidikan di Tanah Papua masih saja terdapat masalah yang harus diatasi pemerintah, terkait dengan layanan pendidikan.

A. Rendahnya Kualitas Pendidikan di Papua

Hambatan utama terhadap pendidikan di Papua antara lain adalah terbatasnya akses pendidikan baik karena faktor-faktor fisik maupun nonfisik. Karakteristik wilayah Papua sangat membatasi kesempatan anak-anak asli

untuk mendapatkan pendidikan. Laporan USAID menyebutkan jarak dari sekolah sebagai alasan utama banyaknya angka putus sekolah di provinsi tersebut. Akan tetapi sebagian besar siswa tinggal di desa-desa terpencil. Menurut hasil Kajian Cepat ILO-EAST, 70 persen anak-anak yang termasuk dalam studi kasus kajian cepat ini, harus menempuh jarak yang jauh untuk ke sekolah, sementara 8 persen anak-anak dalam studi kasus ini menyatakan tidak ada sekolah yang dapat diakses oleh mereka di manapun. Sementara sekolah-sekolah bisa jadi jauh (40 persen anak-anak tinggal antara 4-11 km jauhnya dari fasilitas terdekat) kondisi jalan-jalan dan ketersediaan transportasi makin memperbesar masalah jarak ini. Peserta didik dari desa-desa sebagian besar berjalan kaki, dengan sampan atau sepeda. Untuk mencapai sekolah bisa memakan waktu dua jam sekali jalan di daerah pesisir. Bisa juga membutuhkan waktu satu minggu dengan berjalan kaki di daerah-daerah yang sangat terpencil.

Sementara hambatan-hambatan fisik merupakan faktor kritis yang mempengaruhi akses, faktor-faktor non-fisik, seperti berbagai bentuk diskriminasi, juga berkontribusi terhadap tingkat putus sekolah. Seperti orang tua melaporkan perilaku diskriminatif para guru terhadap para siswa asli. Bentuk-bentuk diskriminasi termasuk stereotipe (stereotyping), komentar verbal, dan penilaian subyektif. Kajian Cepat ILO-EAST menemukan bahwa diskriminasi yang dipersepsikan mempengaruhi 40 persen dari total 495 anak-anak (221 perempuan dan 274 laki-laki) yang disurvei dalam Kajian Cepat. Kemudian kesenjangan kemampuan antara siswa asli dan non-asli (pendatang) mungkin memperburuk perlakuan yang tidak sama. Anak-anak asli seringkali

harus berjuang untuk menyamai hasil teman-teman sekolah mereka. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam sistem pendidikan formal untuk memenuhi kebutuhan siswa asli. Terlepas dari dampak positif subsidi pemerintah, pendidikan yang terjangkau di Papua tetap menjadi keprihatinan, khususnya karena dampak langsungnya terhadap pekerja anak. Biaya langsung dan tidak langsung dari pendidikan formal seringkali mengharuskan keluarga-keluarga termiskin untuk menyediakan dana tambahan untuk membiayai sekolah. Jika perlu, anak-anak itu sendiri diminta untuk menyediakan dana tambahan tersebut.

Kajian Cepat ILO-EAST menemukan dalam 16 persen studi kasus dari Kajian Cepat ini bahwa alasan memasuki pekerja anak adalah kebutuhan anak untuk membayar biaya sekolah. Anak-anak asli Papua yang berasal dari daerah terpencil banyak yang memutuskan untuk pindah ke kota-kota besar, agar dapat memperoleh akses dan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Namun ketika mereka berada di kota, mereka kemudian terlibat menjadi pekerja anak agar dapat membiayai sekolah mereka. Pemerintah pusat dan lokal Indonesia telah mensubsidi pendidikan formal sejak tahun 2005 melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Skema BOS dapat menutupi hingga 70 persen biaya siswa untuk pendidikan dasar (SD dan SMP). Keluarga-keluarga dalam kelompok paling miskin berhak untuk mendapatkan pembiayaan penuh. Walaupun BOS telah berkontribusi besar untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, kemampuan untuk membiayai biaya-biaya sekolah lainnya seperti biaya buku pelajaran, seragam dan transportasi masih merupakan tantangan di

Papua. Subsidi publik untuk rumah tangga termiskin tidak selalu dapat menutupi biaya sekolah sepenuhnya, karena biaya-biaya umumnya ditentukan oleh masing-masing komite sekolah di lapangan. Ketika biaya yang ditutupi hanya 60 atau 70 persen, beberapa keluarga mengalami kesulitan untuk menutupisanya. Subsidi publik di dalam Biaya Operasional Pendidikan (BOP, mirip dengan BOS tapi menargetkan pada biaya-biaya operasional) mensubsidi biaya-biayaujian, tapi seringkali mengalami keterlambatan dalam pengirimannya. Hal ini menyebabkan para keluarga harus menyediakan biaya tersebut terlebih dahulu.

Kemudian Peraturan masuk untuk sekolah formal mensyaratkan orang tua untuk menyatakan pendapatan tetap mereka setiap bulan. Akan tetapi, keluarga-keluarga miskin kemungkinan besar tidak memilikinya dan gagasan mengenai pendapatan tetap itu sendiri mungkin tidak berlaku untuk kegiatan-kegiatan tradisional masyarakat asli. Biaya-biaya tidak langsung seperti perlengkapan sekolah atau transportasi bisa tidak terjangkau dan menghambat kehadiran teratur peserta didik dan pada akhirnya menyebabkan peserta didik putus sekolah. Biaya kesempatan (opportunity cost) dari waktu anak yang dihabiskan di sekolah daripada untuk menopang pendapatan keluarga kemungkinan besar akan mempengaruhi keterjangkauan pendidikan. Kajian Cepat menemukan bahwa keluarga miskin memilih mengalokasikan waktu anak-anak mereka pada pekerjaan daripada pada pendidikan, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari nilai tukar (the trade-off) dari pilihan tersebut. Lebih dari sepertiga anak-anak yang bekerja melakukan pekerjaannya karena mereka perlu berkontribusi bagi pendapatan

keluarga. Pekerjaan mengganggu waktu sekolah dan menyebabkan anak-anak kelelahan dan tidak dapat mengerjakan Pekerjaan Rumah mereka. Alasan-alasan ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya putus sekolah di provinsi tersebut.

Selain itu kualitas pendidikan formal di Papua dibatasi oleh kurangnya pelatihan bagi guru, dan tantangan keterpencilan dan kurangnya infrastruktur. Bank Dunia telah merangkum tantangan-tantangan terbesar untuk pendidikan di pedesaan sebagai menghasilkan guru-guru yang berkualitas, mengirim mereka ke sekolah-sekolah di pedesaan, dan memberikan mereka dukungan profesional dan juga dukungan moral. Tantangan-tantangan tersebut juga berlaku pada konteks Papua. Persiapan guru, khususnya dalam pembelajaran yang sensitif terhadap budaya asli masyarakat di Papua, masih perlu ditingkatkan. Bukti dari Kajian Cepat ILO-EAST menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan guru-guru untuk menangani lingkungan pendidikan yang sensitif terhadap budaya asli di masyarakat Papua dengan sikap profesionalisme dan kesetaraan, telah berkontribusi terhadap putus sekolah sekitar 40 persen anak-anak asli Papua yang terlibat dalam studi kasus Kajian Cepat ini.

Ketersediaan guru-guru di pedesaan dibanding di perkotaan tidak seimbang, di mana wilayah pedesaan berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Sekolah-sekolah lebih terpusat di kota-kota. Selain itu, guru-guru menunjukkan kesediaan dan motivasi yang rendah untuk bekerja di kabupaten-kabupaten terpencil. Sistem kompensasi untuk tugas di area-area terpencil yang cukup berat sering mengalami keterlambatan, dan

tunjangan jika memang tersedia jarang didistribusikan tepatwaktu. Pengirimangaji jugatertunda karena kurangnya bank dan ketertinggalan jaringan transportasi. Tunjangan guru yang kurang memadai dan pengiriman gaji yang terlambat membuat guru merasa kurang dihargai dan tidak termotivasi. Akibatnya guru menjadi kurang berkomitmen dan hal ini diwujudkan dalam bentuk profesionalisme yang rendah.

Dampak pada kualitas mengajar menjadi terpengaruh, terutama karena pengawasan di wilayah yang terisolasi juga terbatas. Orang tua sering kalimelaporkan ketidakhadiran guru yang sistematis dan berkepanjangan. Kemudian Kurikulum sekolah tidak relevan dengan konteks lokal dan mengakibatkan ketidaksesuaian dengan tujuan pendidikan. Meskipun mata pelajaran sekolahdistandarkan di seluruh Indonesia, beberapa-mata pelajaran tersebut kurang cocok dengan kebutuhan dan kemampuan para siswa diPapua. Pengetahuan lokal dan mata pencaharian tradisional masihdikesampingkan dari kurikulum sekolah formal yang berlaku di Papua. Karena itu, banyak keluarga di Papua menganggapnya tidak relevan, karena tidak melengkapi anak-anak mereka dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk berintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat asli ketika dewasa. Kurikulum nasional seringkali mengabaikan nilai-nilai tradisional, kadangkala sebagai akibat sulitnya menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam mata pelajaran sekolah. Akibatnya, muatan pendidikan diambil dari realitas infrastruktur, usaha dan gaya hidup yang tidak ditemukan di daerahpedesaan Papua. Penggunaan bahasa di pendidikan formal, yaitu Bahasa Indonesia, memiliki keuntungan dan kerugian. Di satu sisi, anak-anak

menjadi fasih mempergunakan bahasa nasional dengan menghadiri sekolah. Hal ini tentu saja perlu untuk memperluas kesempatan kerja dan sosial mereka di masa depan di luar kampung halaman mereka. Di sisi lain, para siswa Papua perlahan-lahan kehilangan kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa tradisional atau bahasa ibu mereka. Bersamaan dengan bahasa, mereka juga kehilangan kemampuan untuk menjelajahi lingkungan lokal, berkomunikasi dengan dan menulis kembali tentang kampung halaman mereka untuk kesejahteraan dan masa depan mereka sendiri. Di satu sisi mereka berintegrasi dengan lebih baik ke dalam masyarakat Indonesia, sayangnya di sisi lain, identitas asli mereka menjadi semakin lemah.²

Masalah kualitas pendidikan di Papua tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat peningkatan mutu pendidikan di Papua, beberapa faktor tersebut di antara lain adalah ketersediaan guru yang sangat minim dan tidak merata di Papua. Guru memegang peran penting dalam proses pendidikan, karena sasaran utama sebuah reformasi kurikulum adalah perbaikan kualitas peserta didik, maka yang menentukan keberhasilannya adalah proses pembelajaran yang langsung dipimpin oleh guru. Maka, amat penting menjelaskan guru yang diharapkan seperti apa. Karakternya seperti apa dan juga kompetensinya yang diharapkan seperti apa. Bagaimana kinerja dan pribadi guru dikembangkan dan juga bagaimana perilaku mereka dipantau. Kekurangan guru sekolah dasar di daerah-daerah pedalaman terpencil yang mengakibatkan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik.

²Organisasi Perburuhan Internasional. *Pekerja Anak dan Pendidikan di Masyarakat Papua*. Diakses pada 17 Februari 2017. <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/publication/wcms_163612.pdf>

Hal ini tergambar dari banyaknya guru yang malas bertugas di daerah–daerah perbatasan dengan berbagai alasan klasik. Tantangan guru di daerah perbatasan di antaranya adalah sulitnya transportasi, kurangnya air bersih, tidak adanya rumah dinas, masyarakat yang nomaden, dan masih berkembangnya budaya kamiri yang mengharuskan anak-anak ikut orangtua ketika mencari ikan atau sagu. Keterlambatan dan ketidakhadiran guru banyak terjadi pada guru yang bertugas di sekolah wilayah pinggiran, perbatasan, dan terpencil. Bahkan guru honorer cenderung lebih rajin kehadirannya dibandingkan guru PNS. Selain faktor banyak guru yang tinggal di kota, faktor banyaknya kepala sekolah yang tidak transparan kepada guru dan masyarakat mengenai bantuan dana ke sekolah juga memicu kesenjangan kepala sekolah dan guru kelas. Hal itu sering memicu guru tidak betah mengajar. Salah satu contohnya Sebuah sekolah di Banti, desa terdekat dari Tembagapura, Mimika yang mengalami kekurangan guru. Salah satu guru di SMP Negeri Banti, Sugiyarto, mengungkapkan, di sekolahnya hanya terdapat 5 guru pegawai negeri. Permasalahannya, karena jumlah siswa banyak, dan mata pelajaran SMP diajarkan oleh guru mata pelajaran, jumlah guru di Banti tergolong minim. Tantangan lain yang dihadapi oleh para guru adalah dorongan orang tua murid yang kurang. Sugiyarto menyebutkan, kerap kali murid tidak masuk dalam hitungan beberapa minggu. Alasannya bervariasi, bisa karena ikut ke kampung atau ada acara pernikahan. Belum lagi, medan yang tergolong sulit semakin menyulitkan akses. Untuk merekrut guru honorer sendiri, kata Sugiyarto, butuh dana lebih dari sekolah. Sedangkan, dengan kondisi ekonomi siswa, maka sekolah kesulitan mendapat

tambahan dana. Dan berharap pemerintah daerah Mimika bisa mengirim lagi guru pegawai negeri ke sekolahnya. Selain itu, di Terpones, Distrik Towe, Keerom, sejumlah oknum guru bahkan mangkir hingga berbulan-bulan. Guru disana dapat dengan mudah meninggalkan ruang kelas dan kabur menumpangi pesawat ke kota. Sejak 2008, SD di Terpones tidak lagi beraktivitas. Masih di Towe, tepatnya di kampung Towe Hitam, guru tak betah tinggal. Alasannya karena biaya hidup yang tinggi dan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan. Guru juga beralih, jika terlalu lama tinggal di kampung, mereka akan kehilangan kesempatan untuk naik pangkat atau kegiatan penjenjangan lainnya. Kemudian Kompetensi kualitas dan mutu tenaga pengajar di Papua sama tidak menggembirakannya dengan pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan dan kesejahteraan guru. Dari sisi infrastruktur hampir seluruh bangunan gedung sekolah di tanah papua adalah peninggalan zaman kolonial Belanda. Begitu pula mutu dan kualitas tenaga pengajar (guru). Sebagian besar guru (khususnya di bagian pedalaman Papua) yang kadang disebut dengan “central highland” adalah juga tamatan Sekolah Guru Bawahan (SGB) zaman kolonial Belanda. Selebihnya adalah tamatan Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Hal yang sungguh memprihatinkan adalah sebagian bangunan sekolah yang dibangun pada zaman kolonial Belanda itu, kini sudah ditutup karena persoalan tenaga pengajar. Yang mutu dan kualitasnya tidak sebanding dengan yang diharapkan. Di pedalaman, sampai saat ini dapat ditemui sebuah sekolah hanya satu atau dua guru saja (baru masalah kuantitas belum, apa lagi

masalah kualitasnya). Demikian adanya kuantitas infrastruktur (yang tidak berisi) dan mutu dan kualitas tenaga pengajar.

Lain persoalan kalau berbicara mengenai kompetensi (mutu) atau kualitas guru yang ada di Papua hingga saat ini, lebih-lebih di pedalaman. Kompetensi tenaga pengajar di Papua terlihat pada kualitas lulusan siswa-siswi. Banyak siswa-siswi tamatan sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama di pedalaman yang tidak bisa membaca dan menulis dapat bercerita tentang kompetensi (mutu) guru di Papua, khususnya di pedalaman. Keterpurukan kompetensi atau mutu guru di Papua disebabkan karena banyak faktor. Seperti yang telah dipaparkan pada bagian atas bahwa, faktor yang satu menyebabkan faktor yang lain. Faktor mendasar merosotnya mutu dan kualitas guru di Papua menurut antara lain:

1. Sekitar 80 persen guru (khususnya guru SD dan SMP) yang ada di Papua, khususnya di pedalaman adalah guru-guru produk paradigma pendidikan lama (antara tahun 70-an sampai 90-an). Proses pembelajaran yang dilakukan adalah cara pembelajaran yang mereka terima di bangku sekolah puluhan tahun yang lalu. Sistem transfer pengetahuan seperti bank. Para guru itu adalah tamatan Sekolah Guru Bawahan (SGB) zaman klonial belanda. Selebihnya adalah tamatan Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Mereka (guru-guru) tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu secara benar dan tepat mengenai teknik, metode dan paradigma pendidikan yang baru. Kalaupun seandainya ada sosialisasi secara baik tentang paradigma pendidikan baru, dengan fasilitas apa mau

dibelajarkan. Buku paket saja mereka masih menggunakan buku paket yang mereka gunakan (ajarkan) sejak tahun 70-an.

2. Lemahnya penguasaan bahan yang diajarkan. Jangankan penguasaan paradigma pendidikan atau kurikulum baru, bahan yang harus diajarkan penguasaannya masih lemah. Akibat dari itu situasi pembelajaran yang terjadi adalah MSH (mencatat sampai habis). Pembejarah tidak pernah tahu untuk apa dia belajar, apalagi mengerti apa yang dia catat, tidak banyak siswa-siswi yang lolos disini.
3. Ketidaksesuaian dengan bidang studi yang dipelajari guru dengan yang diajarkan di sekolah.
4. Para guru jarang belajar dari keberhasilan dan kegagalan dari pembelajaran yang mereka lakukan.
5. Kurangnya wibawa guru terhadap murid.
6. Lemahnya motivasi dan dedikasi yang sungguh-sungguh menjadi pendidik. Kebanyakan orang menjadi guru hanya kebetulan saja sebagai alternatif terakhir. Pembangunan manusia tidak bisa lepas dari rendahnya mutu dan kualitas guru (kompetensi intelektual) dan material. Faktor materil yang kecil ini menyebabkan orang muda yang berkualitas malas menjadi guru. Yang menjadi guru adalah mereka yang terpaksa dan mutunya biasa-biasa saja.
7. Keterlibatan guru dalam penyusunan kurikulum sudah tidak ada. Guru hanya sebagai operator kurikulum. Padahal konteks ideal guru harus terlibat mulai dari persiapan penyusunan kurikulum, penyusunan, pelaksanaan, dan sampai pada tahap evaluasi, dan kesimpulannya.

8. Kurangnya kematangan mutu emosional, kemandirian berpikir dan keteguhan sikap. Dari kepribadian mereka tidak siap menjadi pendidik. Kebanyakan guru dalam hubungannya dengan murid hanya berfungsi sebagai pengajar bukan pendidik.
9. Lemahnya perhatian dan kontrol langsung ke lapangan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pelaksana pendidikan di daerah. Pelaksana pendidikan di daerah malas turun ke lapangan. Tidak pernah ada tinjauan dan sosialisasi paradigma pendidikan baru. Ada rencana training para guru dengan dana yang besar dengan waktu yang panjang, misalnya. Setelah dana tersebut sudah ada, materi dipadatkan yang penting ada laporan, ada presensi, ada piagam untuk urusan *credit point*, dan uang tranfort dibagikan. Tidak pernah ada evaluasi dan kontrol. Pokoknya kegiatan terlaksana dan dana terpakai habis. Titik. Jadi mutu dan kualitas guru sebagai tenaga pengajar belum siap.
10. Kesejahteraan guru. Kurangnya kesejahteraan guru yang memadai sungguh berpengaruh pada kompetensi (mutu) guru. Karena gaji gurunya kecil, para guru selalu saja mencari penghasilan tambahan. Guru di kota, pada sore hari berprofesi sebagai tukang ojek atau pekerjaan lain yang mendatangkan uang. Guru di pedalaman pulang sekolah bekerja kebun atau memelihara hewan ternak. Tidak ada waktu lagi untuk membaca, merencanakan pembelajaran, mengevaluasi. Pokoknya pergi ke sekolah menghabiskan materi pelajaran. Setelah itu, dilanjutkan pekerjaan rutinitas mencari duit, anehnya, kadang-kadang gaji para guru sering

terima pertengahan bulan, akhirnya setelah menerima gaji hanya menutup utang.³

Mengenai permasalahan minimnya guru, perlu adanya pendistribusian guru yang merata di setiap sekolah di Papua. Selain itu, guru harus menyadari bahwa mereka adalah abdi negara. Oleh karena itu guru yang tidak lain sebagai salah satu pelaku pendidikan harus siap melayani kebutuhan pendidikan salah satunya mendidik siswa dengan keikhlasan. Sehingga guru akan selalu merasa senang dan tidak terbebani meskipun waktu dan pikirannya ia sumbangkan demi pendidikan.

Kemudian ketersediaan gedung sekolah yang masih kurang terutama di daerah terpencil Papua. Saat ini terdapat kesenjangan yang sangat mencolok antara pembangunan sektor pendidikan di kota dan daerah terpencil. Kalau di kota fasilitas gedung sekolah memadai, tenaga guru melimpah, dan dukungan serta perhatian dari berbagai komponen begitu besar untuk menunjang pendidikan. Tapi di daerah terpencil semua itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Di Papua hampir sebagian besar persoalan yang dihadapi yakni kondisi gedung-gedung sekolah yang masih jauh dari layak. Jika kondisi ini diperhatikan serius Diknas RI, maka pada titik inilah pemerintah membebaskan para siswa dari ketertinggalan dan kemiskinan. Paling kurang di kampung-kampung pedalaman dan pesisir pantai Papua itu dibangun gedung sekolah yang representatif yang dilengkapi dengan perumahan guru dan sarana penunjang pendidikan lainnya. Saat ini hampir 80 persen kondisi

³Hasan Ali. My heritage. *Keprofesionalisme Mutu Dan Kualitas Pendidikan di Tanah Papua*. Diakses pada 25 Februari 2017. <
<https://www.myheritage.com/FP/newsItem.php?s=28894481&newsID=1&sourceList=home>>

gedung SD di pedalaman dan pesisir pantai Mimika dalam kondisi yang memprihatinkan, di sisi lain yayasan tidak mampu merenovasi gedung sekolah yang sudah rusak karena tidak memiliki dana. Contohnya pada Pendidikan di Kabupaten Mimika yang diketahui masih sangat dibutuhkan anak-anak usia produktif dan terlebih berada di tengah Kota Timika, ternyata terbiarkan dan memberi kesan buruk terhadap kepemimpinan dunia pendidikan Mimika saat ini.⁴

Fakta ini dapat dilihat dari kondisi bangunan fisik Sekolah Dasar Negeri (SDN) 9 di Jalan Hassanuddin Rt.24 Kampung Lanuga, Distrik Mimika Baru. Bangunan baru sudah ada, tapi entah kenapa belum bisa digunakan karena memang belum ada fasilitas meja kursi dan masih harus mengalami renovasi kembali akibat kondisi plafon-nya yang sudah rusak. Sedangkan guru dan para pelajar jelas membutuhkan dukungan bangunan yang layak dan memadai demi terselenggaranya suatu proses belajar dan mengajar yang diharapkan berkualitas. Gedung baru SDN 9 di Jalan Hassanuddin itu, kelihatannya sangat bagus dan terdapat empat ruangan kelas, dengan dinding bangunan yang terbuat dari seng saja. Sedangkan untuk kursi dan meja, hanya terbuat dari kayu-kayu bekas, lantai kelasnya juga hanya ditimbun. Sehingga bangunan sekolah tersebut tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar. Bangunan Kantor Kepala SDN IX pun demikian, kondisi bangunannya tidak layak digunakan. Seharusnya, masalah pendidikan dan fasilitas bangunannya diperhatikan pemerintah. Sudah lima

⁴Berita Sore. *Pemerintah Didesak Perhatikan Pendidikan Di Pedalaman Papua*. Diakses pada 26 Februari 2017. <<http://beritasore.com/2007/05/02/pemerintah-didesak-perhatikan-pendidikan-di-pedalaman-papua/>>

tahun lebih, mereka menggunakan bangunan sekolah sementara yang dalam kondisi yang tidak layak di pakai untuk proses belajar mengajar ini. Namun, untuk memberikan pendidikan kepada siswa dan siswa, kami terpaksa menggunakannya. Memang gedung sekolah sudah dibangun oleh pemerintah dan ada tiga ruangan kelas dan satu kantor. Namun yang menjadi menjadi dan itu menjadi alasan pihaknya, gedung sekolah yang baru ini juga belum bisa digunakan. Selain, belum adanya akses akses jalan menuju ke sekolah tersebut karena berkolam, berlumpur dan berumput. Selama ini juga belum bisa ditimbun atau diperbaiki pemerintah. Alasan lainnya, bangunan sekolah itu juga belum ada listriknya, plafon, bahkan meja kursi serta lemari. Termasuk sejumlah fasilitas lainnya juga belum ada. Termasuk belum ada juga halaman sekolah yang dibuat, sehingga rumput-rumput kembali tumbuh liar dimana-mana. Bangunan gedung sekolah itu jelas bisa mubasir jika tidak segera digunakan. Bisa saja kami gunakan bangunan sekolah itu untuk proses belajar mengajar. Tapi kalau tidak ada meja kursi dan papan tulisnya, bagaimana proses belajar mengajar bisa berjalan baik. Meskipun pihaknya sudah pernah melakukan kordinasi dengan kepala dinas pendidikan sebelumnya. Namun, sekarang sudah roling kembali. Sehingga belum melakukan kordinasi kembali dengan kepala dinas yang baru terkait bangunan dan fasilitas sekolah. Sudah cukup lama mereka menunggu pemerintah untuk memfasilitasi sekolah kami, namun hingga saat ini pula belum ada respon atau tanggapan yang baik. Ditambahkan Nahum, SD Negeri IX ini merupakan sekolah pemerintah yang seharusnya mendapatkan perhatian utama. Namun kenyataannya, belum mendapatkan perhatian secara

husus. Walaupun demikian, pihaknya tetap bersabar dan percaya bahwa pemerintah dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan, walaupun dalam waktu lama. Pemerintah menyuruh anak-anak Papua harus bersekolah, mereka sudah bersekolah. Namun, apakah bangunan sekolah dan fasilitasnya sudah disiapkan belum. Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan. Tercatat, ada 7.628 ruang kelas yang rusak pada tingkat SD, di tingkat SMP 2.246, dan 1.158 di tingkat SMA. Sementara, persentase penduduk tuna aksara tahun 2014 juga sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain. Pendidikan di Papua juga terhambat dengan masalah kemiskinan, dimana anak-anak di Papua terkendala untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena masalah ekonomi. Padahal pemerintah di Papua sendiri sudah mengalokasikan dana pendidikan untuk anak-anak Papua. Dana pendidikan di Papua, yakni hanya Rp 100 miliar dari total Rp 11,94 triliun APBD 2015 Provinsi Papua. Dengan angka tersebut, Papua menempati posisi terakhir sebagai provinsi dengan persentase alokasi APBD terendah untuk pendidikan, yakni 0,84 persen, di mana setiap siswa hanya mendapat Rp 165 ribu per tahun. Kondisi ini, menjadi penyebab buruknya fasilitas pendidikan di Papua. Dari 3.157 satuan pendidikan dasar hingga menengah, tercatat 7.628 ruang kelas SD rusak dan 2.388 lainnya tidak bisa dipakai. Demikian pula, 2.246 ruang kelas SMP rusak dan 383 lainnya tidak bisa dipakai. kondisi pendidikan di Papua juga bertambah dengan rendahnya angka partisipasi siswa pada 2015 di mana dari 399.437 siswa SD, 43,3 persen tidak hadir; dari 116.034 siswa SMP, 58,7 persen tidak hadir dari 91.546 siswa SMA/SMK, 64,4 persen tidak hadir. Bahkan, angka buta huruf (tunaakhsara) di provinsi itu

menempati peringkat tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia, yakni 28,61 persen, sangat jauh di atas angka nasional sebesar 3,7 persen.

B. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Papua

Kini pendidikan memang menjadi fokus yang utama selain bidang ekonomi. Bahkan suatu penelitian mengatakan bahwa kemajuan perekonomian suatu negara dapat tercipta dari pola pendidikan dan kualitas pendidikan yang baik. Kualitas pendidikan di Indonesia memang tidak tertinggal dibandingkan kualitas pendidikan dinegara lain, hanya saja polanya dan tidak meratanya saja yang menjadi permasalahan. Untuk desa-desa yang tertinggal dan jauh dari perkotaan dan pusat pemerintahan, kualitas pendidikannya memang belum sangat maju dibandingkan pendidikan diwilayah-wilayah perkotaan dan pusat pemerintahan. Selain fasilitas pendidikan yang masih kurang mendukung seperti kurangnya pusat pembelajaran seperti sekolah, terkadang kurangnya tenaga pengajar pun menjadi salah satu kendala majunya kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam dunia pendidikan Papua ataupun Papua Barat kualitas pendidikannya lebih rendah dari pada pendidikan di daerah lain di Indonesia. Apabila dilihat dari akreditasi institusinya, hingga saat ini belum ada satupun perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik di wilayah Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, harus ada upaya keras untuk mengakselerasi perkembangan pendidikan di daerah ini, yang tidak saja melibatkan lembaga-lembaga pendidikan itu sendiri, tetapi juga

harus mendapat dukungan dari korporasi yang ada di wilayah itu, masyarakat luas, serta dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu diperlukan juga upaya yang sinergis untuk membenahi sistem pendidikan yang kontekstual dan selaras dengan kondisi budaya masyarakat setempat juga sangat diperlukan. Hal ini penting mengingat biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang cukup mahal, seperti penyediaan sarana kampus yang memadai, meliputi gedung dan kelengkapan. Pemerintah Indonesia (PI) serta Pemerintah Provinsi Papua telah membuat kemajuan-kemajuan dan telah mengembangkan banyak inisiatif yang progresif khususnya untuk meningkatkan akses ke pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak di Papua. Beberapa diantaranya termasuk komitmen untuk membangun Sekolah SatuAtap (SATAP) SD-SMP berasrama, dan meningkatkan jumlah pengirimanguru-guru khususnya ke daerah-daerah/kabupaten-kabupaten terpencil di Papua. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pekerja anak, penegakan hukum-hukum yang terkait dan menjamin pendirian Komite Aksi Provinsi untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi Papua. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, 1973 (No. 138) dengan UU No. 22 tahun 1999 dan Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182) dengan UU No. 1 tahun 2000. Pemerintah juga telah memformulasikan rencana-rencana aksi spesifik untuk mempraktekkan kewajiban-kewajiban internasional. Meskipun demikian, implementasi di

Papua berlangsung lambat seperti beberapa penjelasan yang dibahas dalam Ikhtisar Kebijakan Singkat ini. Dengan adanya pekerja anak dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari provinsi ini, sebuah rencana aksi harus dirancang secara khusus untuk Papua. Prioritas harus berfokus pada menegakkan undang-undang anti pekerja anak. Kemudian melembagakan dan mereplikasi Sistem Pemantauan dan Rujukan Pekerja Anak yang telah dilakukan di Kabupaten Jayapura. ILO EAST telah bekerja sama dengan Komite Aksi Kabupaten Jayapura Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak untuk melakukan percontohan Sistem Pemantauan dan Rujukan Pekerja Anak sejak tahun 2009. Sebanyak 52 kasus pekerja anak telah berhasil dikembalikan ke pendidikan. Advokasi intensif kepada seluruh pemangku kepentingan dan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan dari pilot ini dan mengembangkannya lebih jauh lagi, di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi. Dan juga terus berinvestasi dalam infrastruktur sekolah untuk memperluas akses ke pendidikan serta meningkatkan jumlah pengiriman tenaga pengajar ke daerah terpencil. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah perkotaan, pedalaman dan perbatasan melalui beberapa hal sebagai berikut Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan beberapa program pendidikan yang spesifik untuk Provinsi Papua seperti Program Pendidikan Murah dan Terjangkau dan Program Pendidikan Bermutu dan Merata. Kemudian, beberapa diskusi telah dilakukan antara Pemerintah Nasional dan Pemerintah Provinsi Papua terkait pembangunan Model Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terintegrasi dengan Dunia Usaha (DUDI–Dunia Usaha

Dunia Industri), pengembangan dan peningkatan jumlah Sekolah SatuAtapBerasrama (SATAP Berasrama), dan model pembelajaran jarak jauh melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian terus memperkuat usahamenuju pendidikan yang berkualitas. Subsidi pemerintah seperti BOS telah secara efektif meningkatkan permintaan akan pendidikan. Pelaksanaan program ini di Provinsi Papua membutuhkan strategi khusus, mempertimbangkan ciri fisik daerah ini, serta tingkat pembangunan infrastrukturnya. Di seluruh Indonesia, Angka Partisipasi Murni (APM) anak-anak di kelompok termiskin telah meningkat lebih dari tujuh poin persentase sejak BOS diberlakukan. Sayangnya, di Papua, subsidi kurang berjalan efektif. Proses pencairannya seringkali terlambat sehingga kurang signifikan dalam mendukung program subsidi ini. Hal ini kemungkinan akan mempengaruhi keputusan suatu keluarga untuk mengirimkan anaknya ke sekolah atau anak menjadi pekerja anak sebagai alternatif untuk membiayai pendidikan. Mengarusutamakan nilai lokal di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Hanya mengandalkan pendidikan formal tidak cukup secara mandiri memberikan persiapan yang dibutuhkan oleh anak-anak asli Papua. Nilai lokal di dalam sistem pendidikan formal juga penting bagi anak-anak asli Papua untuk dapat tumbuh sebagai orang-orang dewasa yang terampil dan aktif secara ekonomi khususnya di dalam masyarakat mereka sebagai bagian masyarakat Indonesia pada umumnya. Di satu sisi, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) perlu digalakkan di Papua, dan kurikulum perlu dibuat agar lebih relevan dengan konteks lokal. Peninjauan kembali kurikulum

pendidikan khususnya di Papua perlu didekatkan sebagai sebuah proses yang inklusif, berpusat pada anak dan terbuka, yang didorong oleh konsultasi dan komunikasi yang berkelanjutan antar komunitas asli dan dengan lembaga-lembaga formal. Di sisi lain, nilai lokal berbasis 'belajar melalui praktek' perlu juga diarusutamakan, karena hal itu penting untuk menjamin adanya transfer keterampilan dan pemantauan bahaya-bahaya kerja terkait. Memberikan penekanan pada peningkatan kapasitas guru disertai dengan insentif yang memadai. Strategi-strategi untuk mengurangi hambatan-hambatan ke pendidikan tidak akan berhasil, kecuali jika para guru dipersiapkan untuk melakukan peran mereka. Tanggung jawab mereka membutuhkan lebih dari penguasaan mata pelajaran. Mereka perlu secara khusus dilatih mengenai perbedaan-perbedaan budaya dan pembelajaran lintas budaya, karena cara pengajaran yang dilakukan oleh guru, akan memiliki dampak terhadap memastikan peserta didik untuk tetap berada di sekolah. Pelatihan yang sesuai dan peningkatan mekanisme pengukuran akuntabilitas, juga bisa menjadi insentif yang efektif dalam meningkatkan profesionalisme para guru. Dalam hal ini, keterpencilan desa-desa di Papua sekali lagi menjadi sebuah tantangan. Karena itu, pemerintah setempat harus mempertimbangkan mekanisme yang paling tepat sasaran untuk membuat guru memiliki tanggung jawab yang sesuai bagi peserta didik mereka dan juga keluarga peserta didik mereka. Guru juga perlu terus dibekali dengan model pembelajaran yang kontekstual.⁵

⁵Organisasi Perburuhan Internasional., *op.cit.*

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengirim 101 tenaga guru sekolah dasar ke Provinsi Papua Barat untuk mengatasi kekurangan guru serta meningkatkan pendidikan dasar di provinsi itu. Guru yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Papua Barat merupakan program guru garda depan guna meningkatkan mutu pendidikan di daerah terpencil dan tertinggal di Indonesia. Dia mengatakan, guru yang dikirim ke Provinsi Papua Barat itu tersebar di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 30 orang, Kabupaten Tambrauw 10 orang, Kabupaten Sorong 30 orang dan Kabupaten Raja Ampat 31 orang. Selain itu pemerintah juga melaksanakan program Program Guru Garis Depan (GGD), Program Guru Garis Depan (GGD) adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan pendidikan yang terjadi di Papua. Program ini dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) serta pemerintah daerah. Tujuannya adalah melakukan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, melalui pendistribusian tenaga pendidik atau guru.

Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa target pemerintah ke depan adalah pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menginginkan agar pelayanan pendidikan di Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur memiliki kualitas yang sama. Program GGD merupakan terobosan program dari pemerintah dalam rangka meningkatkan dan menciptakan pemerataan kualitas tenaga pendidik. Melalui program ini pemerintah mengalokasikan 3.500 guru yang ditempatkan di Papua dan

Papua Barat, serta Aceh dan Maluku. Mereka akan menggantikan guru-guru lulusan SMP dan SMA yang masih tersebar di berbagai wilayah pedalaman. Status mereka pun adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pemerintah daerah setempat, bukan terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga, komitmen mereka diharapkan lebih kuat untuk membangun daerahnya sendiri. Kepada para peserta GGD, Presiden Jokowi mengimbau agar memberikan pendidikan karakter mental yang baik pada peserta didiknya. Anak-anak yang berasal dari daerah terpencil atau daerah perbatasan harus mempunyai kebanggaan terhadap Indonesia. Mereka adalah anak Indonesia yang ke depan dapat bekerja di seluruh daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Khusus untuk Papua, selain program GGD, pemerintah juga melanjutkan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). yang merupakan program afirmatif bagi pemuda-pemudi Papua dan Papua Barat untuk melanjutkan pendidikan di sejumlah daerah seperti Jawa dan Bali. Program ADEM bergulir sejak tahun 2013 dan telah memasuki tahun ketiga pada 2015 ini. Sebanyak 1.304 anak Papua telah menimba ilmu di tingkat SMA atau SMK di Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Bali. Untuk program ADEM 2015, tercatat 505 anak Papua menempuh pendidikan SMA dan SMK di enam provinsi tersebut. Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, utamanya pada sektor Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui unit utamanya, memiliki berbagai program prioritas untuk mencapai kemajuan dan percepatan pembangunan pendidikan di kedua provinsi tersebut. Khusus

untuk anak-anak Papua dan Papua Barat, guna mengejar ketertinggalan pendidikan mereka di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemdikbud telah menyiapkan skema bantuan yang diprioritaskan seperti BOS dan PMU. Dengan bantuan ini seluruh anak Papua dan Papua Barat menerima bantuan-bantuan tersebut tanpa terkecuali. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Supriadi Rustad mengutarakan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) telah menyiapkan berbagai program yang terfokus pada daerah yang terkatagori Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) di mana Papua dan Papua Barat menjadi bagiannya. Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia (MBMI) sebagai salah satu program tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2013 program SM3T khusus Papua dan Papua Barat telah menjangkau daerah-daerah yang paling terpencil di kedua provinsi tersebut.⁶

Pada tahun 2013 berkat kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah dan Bapak Bupati semua, kami sudah berhasil mengirimkan peserta SM3T ke daerah-daerah yang tergolong khusus dikarenakan medan, kondisi dan tantangan yang akan dihadapainya. Para peserta SM3T adalah para Sarjana Kependidikan terbaik yang telah memiliki bekal keilmuan dan pedagogik yang relevan dan mendukung proses pendidikan di daerah 3T. Sebelumnya para calon peserta SM3T tersebut mengalami seleksi, baik seleksi tahap akademis maupun psikologis yang terbagi menjadi tiga tahapan yaitu, tahap nasional, tahap LPTK dan tahap daerah pengabdian. Untuk

⁶PresidenRi.go.id. *Membangun Papua Melalui Pendidikan*. Diakses pada 2 Maret 2017. <<http://presidenri.go.id/pendidikan/membangun-papua-melalui-pendidikan.html>>

seleksi di daerah pengabdian, Alhamdulillah semua peserta SM3T di daerah Papua dan Papua Barat lolos semua, jumlah yang dikirim sama dengan jumlah yang kembali pulang setelah pengabdian. Selain SM3T, Program PPGT pun memiliki fokus yang sama dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan di daerah Papua dan Papua barta. Dengan PPGT kami memboyong putra-putri terbaik dari Aceh, NTT, Papua dan Papua Barat untuk kami didik dan persiapkan di LPTK agar kelak mereka menjadi pendidik yang berkualitas dan memajukan provinsi mereka masing-masing. Saat ini sekitar 500 putra-putri dari daerah tersebut belajar di LPTK terbaik di Indonesia. Ditjen Dikti bekerjasama dengan Majelis Rektor Perguruan tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) berupaya terus untuk memberikan yang terbaik bagi putra-putri Papua yang kini berada di 39 perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk menenuntut ilmu.

Selain usaha yang dilakukan pemerintah Papua, pemerintah RI yang dipimpin oleh Dirjen HAM bekerja sama dengan Komite HAM EKOSOB PBB. Pertemuan ke 52 Komite HAM PBB tentang ECOSOB Papua di Jenewa, Swiss cukup mendapat perhatian para pihak. Banyak hal yang disorot oleh anggota komite, mulai dari permasalahan pendidikan sampai pada permasalahan kesehatan. Kepala UP4B Bambang Darmono dengan Anggota Komite HAM EKOSOB PBB Ms. Heisoo Shin berbincang serius mengenai perkembangan pendidikan di Papua di Gedung Komite HAM PBB di Palais Wilson, Geneva, Swiss. Heisoo Shin, dari Korea Selatan, salah satu anggota komite, terlibat pembicaraan serius dengan Kepala UP4B dalam membahas permasalahan-permasalahan pendidikan yang menonjol,

hususnyapermasalahan kecukupan guru untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah di Papua dan Papua Barat. Ibu Shin memiliki perhatian kepada dunia pendidikan, maka dari itu ia sungguh-sungguh memperhatikan kondisi pendidikan di Indonesia, dan Papua khususnya. Delegasi Pemerintah RI yang dipimpin oleh Dirjen HAM KemenukHAM, Prof. Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan pencapaian dan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia dan perkembangan kondisi hak ECOSOB lainnya. Secara khusus juga menjelaskan upaya-upaya pemerintah dalam memperbaiki penyelenggaraan pendidikan untuk anak-anak Papua. Dalam kesempatan tersebut Kepala UP4B menjelaskan, saat ini sudah terjadi ekselerasi perbaikan penyelenggaraan pendidikan untuk anak-anak Papua. UP4B telah mengkoordinasikan program-program perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Papua dan Papua Barat, melalui serangkaian program afirmasi untuk pendidikan. Penambahan pembangunan sekolah baru dan penambahan tenaga guru melalui program SM3T, dan lain-lain. Setelah mendapat keterangan dari Kepala UP4B, Ibu Shin bisa memaklumi berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan perbaikan kondisi pendidikan di Papua. Di samping itu ibu Shin juga bisa memahami kendala dan tantangan pemerintah memajukan pendidikan di Papua. Selanjutnya Ibu Shin meminta pemerintah tetap memperhatikan dan memperbaiki terus-menerus penyelenggaraan pendidikan di Papua.⁷

⁷Gema Papua. *Kondisi Pendidikan Jadi Perhatian Komite HAM ECOSOB DI Jenewa*. Diakses Pada 3 Maret 2017. <<http://gemapapua.com/kondisi-pendidikan-jadi-perhatian-komite-ham-ecosob-di-jenewa/>>

Selain itu salah satu contoh yang dilakukan pemerintah Papua dalam meningkatkan pendidikan seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas utama dalam RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2016. Kondisi pendidikan yang memprihatinkan telah menjadi perhatian pemerintah daerah sejak awal mulai berdirinya Kabupaten Pegunungan Bintang. Mulai tahun 2003 hingga saat ini telah banyak dilaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan telah memberikan dampak membaiknya kondisi penyelenggaraan pendidikan di daerah. Namun demikian dengan keterbatasan sumberdaya anggaran dan aparatur serta hambatan kondisi geografis wilayah yang berat, tujuan pembangunan pendidikan di daerah belum sepenuhnya terwujud. Dalam upaya percepatan pembangunan pendidikan di daerah, disusun strategi pembangunan pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu:

1. Pengawasan, Pembinaan secara kontinyu, Konsisten kepada Tenaga Pendidik.
2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan lewat pelatihan, penataran kursus, kualifikasi dan sertifikasi guru.
3. Pengembangan serta pembenahan sarana prasarana berbagai jenjang pendidikan demi terwujudnya pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien yang berpola wilayah.
4. Mengakomodir siswa/siswi berprestasi dari berbagai jenjang pendidikan untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah unggulan serta pendidikan tinggi dalam daerah dan luar negeri.

5. Pendataan penduduk buta aksara dengan anak usia putus sekolah yang akurat.
6. Meningkatkan kesejateraan tenaga kependidikan demi untuk memberikan motivasi dalam kinerja.

Dalam upaya pelaksanaan strategi pembangunan pendidikan dimaksud, maka arah kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan Manajemen Pelayan Pendidikan yang terjangkau dengan kebijakan Mewujudkan manajemen kelembagaan Pendidikan tingkat Distrik dalam memperpendek jangkauan Pelayanan Pendidikan, mewujudkan manajemen pelayanan tingkat jenjang Pendidikan (sekolah) melalui Pelaksana, Pengawas. Meningkatkan Pelayanan Mutu Pendidikan melalui berbagai kebijakan meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan, meningkatkan kader yang siap menjadi guru, meningkat peserta didik yang siap bersaing pada Pendidikan Mengah dan Tingkat Perguruan Tinggi baik lokal, Nasional maupun Internasional, meningkatkan pengembangan kurikulum pada berbagai tingkat satuan Pendidikan (Sekolah), meningkatkan sarana prasana di setiap jenjang pendidikan sebagai faktor penunjang dalam proses pembelajaran. Mewujudkan Pembangunan Pendidikan berbasis wilayah dengan arah kebijakan mewujudkan kawasan pendidikan yang memiliki daya tampung, basis pengembangan mutu dan menjadi pusat belajar dari kelompok masyarat yang terbelakang, meningkatkan daya tampung bagi anak-anak usia sekolah. Meningkatkan pelayanan terhadap kelompok kurang beruntung dalam mendapatkan pendidikan dengan kebijakan meningkatkan pelayanan terhadap kelompok putus sekolah dengan membentuk Pusat

Kegiatan Kelajar Masyarakat (PKBM), meningkatkan pelayanan terhadap kelompok usia dini untuk memasuki usia sekolah, meningkatkan pengembangan mutu pelayanan terhadap Pelaksana dan pelaku kelompok putus sekolah. Meningkatkan pelayanan Kesejahteraan dengan kebijakan, meningkatkan pelayanan nasib, kesejahteraan pegawai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Sebagai langkah operasional terhadap arah kebijakan pembangunan pendidikan, program strategis yang diprioritaskan antara lain:

1. Pembangunan sekolah berbagai jenjang pendidikan yang selama ini terpencar di lereng-lereng gunung perlu pembangunan Kawasan Pendidikan Berpola Asrama dalam satu wilayah tertentu untuk meningkatkan Manajemen Pengelolaan, Pengawasan dan SDM secara efektif dan efisien.
2. Guru dan tenaga kependidikan yang tersedia sangat kurang karena banyak yang sudah pesiun, mutasi dan meninggal dunia, sehingga pembagian tidak sesuai dengan kebutuhan setiap Sekolah, maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat menyiapkan lulusan SMP, SMA/SMK melanjutkan ke Pendidikan Guru untuk memenuhi kebutuhan Guru.
3. Pembangunan Rumah Dinas Guru belum mencukupi kebutuhan, oleh sebab itu pemerintah daerah berusaha membangun perumahan guru secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan rumah guru berbagai jenjang pendidikan.

4. Sesuai dengan Undang-undang Guru dan Dosen bahwa para Guru dan Dosen perlu meningkatkan Kualifikasi Pendidikan, terutama guru di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagian besar belum memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan, oleh sebab itu pemerintah daerah telah berusaha meningkatkan kualifikasi guru di berbagai jenjang pendidikan secara bertahap untuk memenuhi standar kualifikasi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru atau tenaga kependidikan.
5. Lulusan dari berbagai jenjang pendidikan belum sepenuhnya melanjutkan pendidikan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah berusaha menyiapkan lulusan siswa berbagai jenjang pendidikan agar dapat melanjutkan pendidikan di berbagai sekolah unggulan terutama pendidikan tinggi di dalam maupun luar daerah secara berkelanjutan dan konsisten untuk meningkatkan SDM yang berkualitas.
6. Pendataan buta aksara, putus sekolah belum dikelola secara maksimal. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah berusaha mendata kembali penduduk buta aksara dan putus sekolah secara valid agar dapat dibangun pusat belajar yang disebut PKBM untuk menuntaskan buta aksara dan putus sekolah secara berjenjang menuntaskan buta aksara dan mengurangi angka putus sekolah.

Beberapa kegiatan pokok yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang sampai tahun 2012, antara lain peningkatan prasarana dan sarana pendidikan gedung sekolah, rumah guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, pembangunan perpustakaan dan laboratorium sekolah, perlengkapan laboratorium dan alat peraga edukasi, pengadaan guru, peningkatan mutu

tenaga pendidik, pengembangan sekolah berpola asrama dan sekolah satu atap, pengembangan sekolah menengah kejuruan, pembebasan biaya SPP dan UAS/UAN, penyediaan biaya studi di sekolah lokal dan luar Pegunungan Bintang (SD, SMP, SMA, PT), dan Beasiswa.

Selain itu, langkah strategis lain yang diambil Pemerintah Daerah dalam upaya mempersiapkan putra-putri asli Papua sebagai generasi penerus bangsa, berupa pengiriman siswa-siswi untuk menempuh pendidikan di luar kabupaten baik di Papua maupun luar Papua. Demikian juga Pemerintah Daerah tengah menjadi kerjasama/kemitraan dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Kaitan hal tersebut, beberapa program yang dilaksanakan antara lain beasiswa S1 dan S2 di Perguruan Tinggi Papua yaitu Uncen, Unipa, USTJ, Uniyap, UOG, Stikom, STIE Port Numbay, STT Fajar Timur, STT Waterpost, IPI. Sementara yang di luar Papua antara lain adalah UGM, Sanata Dharma, UKSW Salatiga, STPMD Yogya. Pengiriman siswa SD, SMP, SMA di sekolah di Jawa: Muntilan, Sleman, Semarang, Yogya. Pengiriman siswa ke STPDN Jatinangor Bandung. Pengiriman siswa ke Perguruan Tinggi di Cina di bidang kedokteran, pertambangan, teknik sipil. Sekolah Pilot, dan seleksi AKABRI, AKPOL.⁸

Pada tahun 2010 dan 2011 Pemerintah Papua mendirikan sekolah unggulan dan pembiayaan gratis bagi sekolah dasar dan menengah, sehingga anak-anak yang memiliki kesulitan biaya sekolah bisa tetap menempuh pendidikan. Kemudian pengadaan guru kontrak dan sertifikasi guru agar di

⁸Kabupaten Pegunungan Bintang. *Bidang Pendidikan*. Diakses Pada 1 Maret 2017. <<http://www.pegbintangkab.go.id/pembangunan-papua/5/4>>

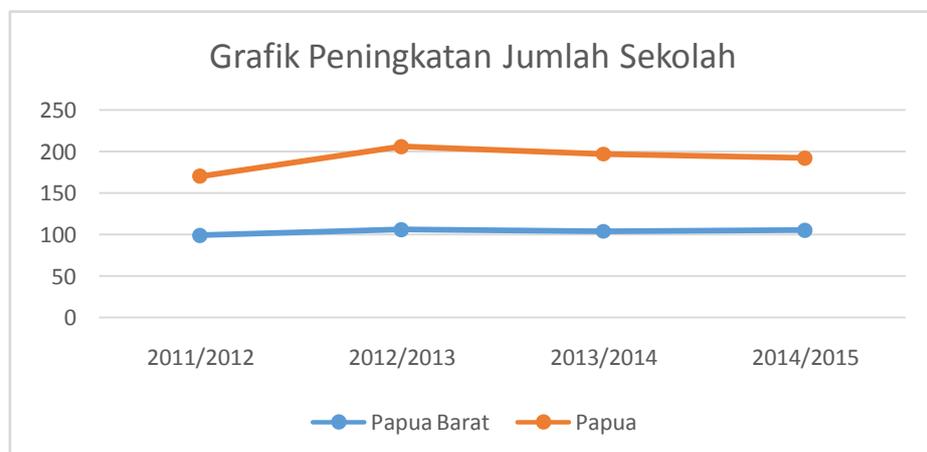
Papua tidak kekurangan tenaga pengajar lagi. Selain itu para guru juga disediakan rumah guru agar lebih dekat dengan lokasi sekolah. Karena salah satu kendala guru yang mengajar di tempat terpencil adalah jauhnya lokasi sekolah dan susah transportasi untuk menuju ke sekolah tersebut. Kemudian pada tahun 2012 Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat masing-masing mencapai Rp 3,5 triliun tahun 2012 ini, sedangkan dana perimbangan kedua provinsi mencapai Rp 27 triliun. Dimana dana tersebut digunakan untuk memperbaiki bangunan sekolah-sekolah di Papua dan Papua Barat, serta membangun sekolah-sekolah baru di daerah terpencil. Kemudian dari tahun 2013-2015 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun (pendidikan dasar) tahun 2013 antarkota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat cenderung merata dan sebagian besar sudah mengikuti pendidikan dasar. Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan di daerah terpencil adalah meningkatkan fasilitas dan dukungan bagi guru yang bekerja di daerah pedalaman tersebut.

Pada tahun 2010 dan 2011 Pemerintah Papua mendirikan sekolah unggulan dan pembiayaan gratis bagi sekolah dasar dan menengah, sehingga anak-anak yang memiliki kesulitan biaya sekolah bisa tetap menempuh pendidikan. Kemudian pengadaan guru kontrak dan sertifikasi guru agar di Papua tidak kekurangan tenaga pengajar lagi. Selain itu para guru juga disediakan rumah guru agar lebih dekat dengan lokasi sekolah. Karena salah satu kendala guru yang mengajar di tempat terpencil adalah jauhnya lokasi sekolah dan susah transportasi untuk menuju ke sekolah tersebut. Kemudian pada tahun 2012 Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat masing-

masing mencapai Rp 3,5 triliun tahun 2012 ini, sedangkan dana perimbangan kedua provinsi mencapai Rp 27 triliun. Dimana dana tersebut digunakan untuk memperbaiki bangunan sekolah-sekolah di Papua dan Papua Barat, serta membangun sekolah-sekolah baru di daerah terpencil. Kemudian dari tahun 2013-2015 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun (pendidikan dasar) tahun 2013 antarkota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat cenderung merata dan sebagian besar sudah mengikuti pendidikan dasar. Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan di daerah terpencil adalah meningkatkan fasilitas dan dukungan bagi guru yang bekerja di daerah pedalaman tersebut.

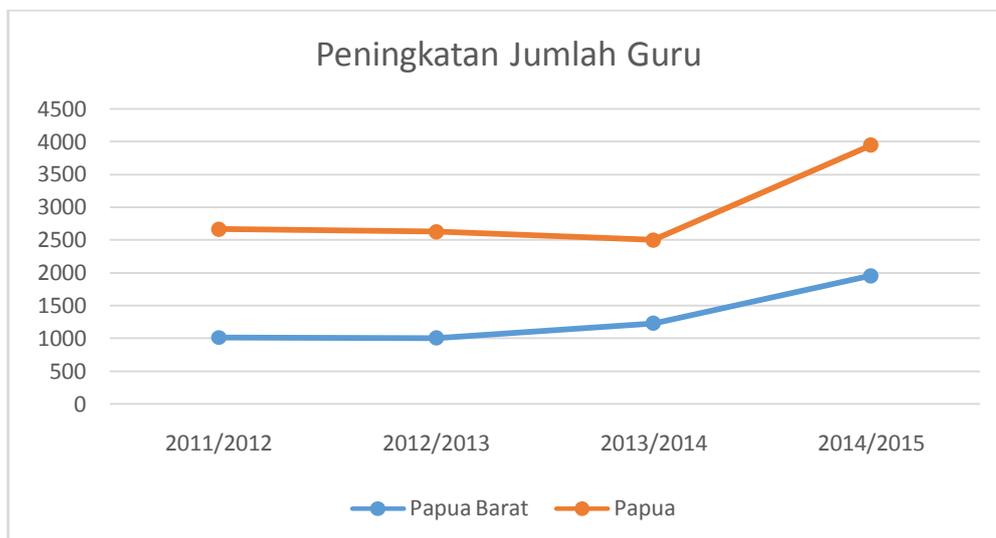
Tabel 1. Peningkatan Jumlah Sekolah di Provinsi Papua Barat dan Papua tahun 2011-2015

Provinsi	Jumlah Sekolah			
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Papua Barat	99	106	104	105
Papua	170	206	197	192
Jumlah	269	312	301	297



Tabel 2. Peningkatan Jumlah Guru di Provinsi Papua Barat dan Papua tahun 2011-2015

Provinsi	Jumlah Guru			
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Papua Barat	1.014	1.007	1.233	1.957
Papua	2.669	2.633	2.503	3.947
Jumlah	3.683	3.640	3.736	5.904



Tabel 3. Peningkatan Jumlah Murid di Provinsi Papua Barat dan Papua tahun 2011-2015

Provinsi	Jumlah Murid			
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Papua Barat	22.802	23.842	23.380	22.776
Papua	45.396	46.748	48.928	50.641
Jumlah	68.196	70.590	72.308	73.237

